

Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Analisis Kebijakan Publik di Kabupaten Lahat

Contribution of the Mining Sector to Community Welfare: A Public Policy Analysis in Lahat Regency

Zetia Wijayanti*, Pandu Pamungkas, Maelani, Anisa Bella, Angel Lauren, Dewi Eliza

Universitas Sriwijaya, Indonesia

* zetiawijayanti@fisip.unsri.ac.id (Primary Contact)

ABSTRACT

Lahat Regency has significant economic potential in the mineral and coal mining sector, which is a major contributor to regional income and plays a crucial role in driving economic growth. This study aims to analyze the mining sector's contribution to improving community welfare in Lahat Regency by incorporating the policy implementation framework proposed by George C. Edward III. The research method employed a qualitative approach through literature study and secondary data analysis sourced from the Lahat Regency Government's Notes to Financial Reports (CaLK) and data from the Central Statistics Agency (BPS). The results show that the mining sector contributes the most to regional income, with a significant increase reaching 36.49% in 2023, and per capita income rising to Rp65.83 million per year. However, this increase has not been accompanied by a decrease in the poverty rate, with Lahat Regency still ranking second in terms of the number of poor people in South Sumatra Province. This condition indicates that the mining sector has not provided an equitable economic impact on the community.

Keywords

public policy, regional revenue, community welfare

Article History

Received: 2026-02-22
Accepted: 2026-03-13

Copyright © 2026, Wijayanti et al.
Published by MAN 4 Kota Pekanbaru
DOI: [10.56113/takuana.v4i4.432](https://doi.org/10.56113/takuana.v4i4.432)

1. PENDAHULUAN

Pendapatan daerah merupakan seluruh hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah (TKD), dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (Indonesia, 2022). Setiap daerah memiliki kemampuan yang berbeda dalam menggali pendapatannya, tergantung pada potensi ekonomi dan kondisi wilayah masing-masing.

Perbedaan potensi sumber daya alam dan struktur ekonomi tersebut menyebabkan variasi dalam komposisi serta kapasitas pendapatan daerah di setiap wilayah.

Kegiatan pertambangan memberikan dampak berupa peningkatan devisa negara juga akan berdampak terhadap lingkungan seperti penurunan produktivitas tanah, pemadatan tanah, terjadinya erosi dan sedimentasi serta terganggunya flora fauna serta kenyamanan penduduk. Selain itu kegiatan pertambangan yang dilakukan di wilayah berpenduduk atau lokasi tempat mencari nafkah penduduk akan menimbulkan dampak terhadap kondisi sosial ekonomi di wilayah tersebut, seperti perubahan pendapatan keluarga, pola pemilikan lahan, pemanfaatan dan penguasaan sumber daya alam, serta pengembangan fasilitas sosial dan aksesibilitas wilayah (Djajadiningrat, 2001 dalam Qomariah, 2003) Dipandang dari sudut ekonomi, keberadaan suatu industri pertambangan dalam suatu wilayah selainya memberikan dampak terhadap perkembangan wilayah yang akan memberi peluang dan upaya perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat serta kesempatan berusaha. Disamping itu keberadaan industri tersebut juga selainya dapat meningkatkan kemampuan ekonomi wilayah yang bersangkutan.

Bila ditinjau dari aspek sosial, keberadaan suatu industri dalam suatu wilayah akan menyebabkan terjadinya pergeseran-pergeseran di dalam masyarakat wilayah yang bersangkutan seperti perubahan pola pikir dan tata cara kehidupan lainnya. Pada satu sisi, proses kegiatan industri pertambangan apapun jenisnya telah memberikan dampak positif kepada kas negara dari pajak dan royalti. Namun pada sisi lain, keberadaan industri pertambangan selama ini telah menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran lingkungan serta pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, budaya masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan itu. Akibatnya pemerintah tidak dapat memberikan kemakmuran bagi masyarakatnya, karena keuntungan pemerintah dari kegiatan tersebut hanya sedikit dibandingkan dengan biaya sosial lainnya (Basuki, 2007).

Dampak positif dari kegiatan pertambangan Batubara selain merupakan sumber pendapatan asli daerah dan sumber devisa negara juga memberikan peran dalam membangun daerah di Indonesia, yaitu dengan terbukanya jalan didaerah yang terisolasi akibat adanya kegiatan pertambangan. Selain itu adanya kegiatan pertambangan akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat didaerah pertambangan tersebut. Dampak negatif yang ditimbulkan akibat kegiatan pertambangan diantaranya adalah kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan muncul diakibatkan karena perusahaan pertambangan tidak memperhatikan lingkungan dalam melakukan kegiatan. Selain itu limbah hasil pertambangan juga tidak diolah dengan baik sehingga mencemari lingkungan. (Djadjadiningrat (2003) dalam Siska (2013).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas kontribusi sektor pertambangan terhadap pendapatan daerah maupun dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkannya, masih terdapat keterbatasan kajian yang secara komprehensif menganalisis sejauh mana kontribusi ekonomi sektor pertambangan tersebut benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah. Sebagian besar penelitian lebih menekankan pada aspek penerimaan daerah atau dampak lingkungan secara terpisah, sementara hubungan antara kontribusi ekonomi sektor pertambangan, distribusi manfaat ekonomi, serta implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat masih belum banyak dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian daerah serta keterkaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat

Dalam perspektif teori analisis kebijakan publik, kondisi tersebut dapat dipahami melalui pendekatan *policy cycle* yang menekankan tahapan perumusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Selain itu, menurut model implementasi kebijakan George C. Edward III, keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Artinya, besarnya potensi pendapatan daerah tidak serta-merta meningkatkan kesejahteraan apabila kebijakan pengelolaannya tidak diimplementasikan secara efektif.

Kabupaten Lahat merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki potensi ekonomi cukup besar, terutama dari sektor pertambangan mineral dan batu bara. Sektor ini menjadi salah satu penopang utama aktivitas ekonomi daerah sekaligus sumber penerimaan bagi pemerintah daerah. Tercatat terdapat 26 perusahaan pertambangan aktif yang beroperasi di wilayah Kabupaten Lahat. Berdasarkan data tahun 2023, produksi batu bara di Kabupaten Lahat mencapai sekitar 44 juta metrik ton (MT), meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya (Zaki, 2024). Aktivitas pertambangan yang tinggi ini berpotensi memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah, baik melalui pajak, retribusi, maupun dana bagi hasil pertambangan yang diterima pemerintah daerah (Ranto et al., 2023).

Berdasarkan penelitian (Dewa et al., 2023), sektor pertambangan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, serta pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Namun, manfaat tersebut hanya dapat berkelanjutan apabila dikelola berdasarkan prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial sebagaimana dikemukakan oleh World Bank. Temuan penelitian terdahulu memperkuat relevansi penelitian ini, mengingat Kabupaten Lahat merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas pertambangan terbesar di Sumatera Selatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sektor pertambangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perspektif analisis kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), yakni mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber ilmiah yang relevan, termasuk buku, artikel jurnal, laporan pemerintah, dan publikasi daring. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi dan fenomena terkait kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, tanpa manipulasi data. Dalam kerangka analisis kebijakan publik, penelitian ini mengacu pada model implementasi kebijakan dari George C. Edward III, yang menekankan empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kerangka ini memungkinkan penelitian untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan pertambangan di daerah telah diimplementasikan secara efektif dan berdampak pada distribusi manfaat ekonomi serta kesejahteraan masyarakat

Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis hubungan antara sektor pertambangan mineral dan Batubara dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lahat melalui sumber data sekunder yang diperoleh dari Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Kabupaten Lahat serta publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu,

penelitian ini juga menggunakan berbagai literatur pendukung seperti jurnal ilmiah, buku, dan laporan pemerintah daerah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengertian dan Tujuan Analisis Kebijakan Publik

William N. Dunn (2000) mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan. Menurut Weimer dan Vining (1998:1), produk dari analisis kebijakan adalah nasihat yang secara spesifik digunakan untuk menginformasikan keputusan kebijakan publik. Dengan demikian, analisis kebijakan publik lebih merupakan bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, yang berisi identifikasi masalah, tugas organisasi publik terkait masalah tersebut, serta berbagai alternatif kebijakan beserta penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan. Tujuan utama analisis kebijakan publik adalah memberikan rekomendasi yang membantu pembuat kebijakan dalam menyelesaikan masalah publik melalui informasi dan argumen yang mendukung pengambilan keputusan.

3.2. Perspektif Teoritis dan Pendekatan Analisis Kebijakan

Menurut Budi Winarno (2005:27), analisis kebijakan berhubungan dengan penyelidikan dan deskripsi sebab-akibat serta konsekuensi kebijakan. Analisis kebijakan merupakan bentuk penelitian terapan yang bertujuan mencapai tingkat pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu sosial dan teknis, sekaligus menyediakan solusi yang lebih baik bagi masalah-masalah publik. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengumpulan informasi, evaluasi alternatif kebijakan, dan pertimbangan konsekuensi agar rekomendasi yang dihasilkan relevan, efektif, dan dapat diimplementasikan secara praktis oleh pembuat kebijakan. Berdasarkan teori William N. Dunn (2000), analisis kebijakan adalah disiplin ilmu sosial terapan yang memanfaatkan metode penelitian dan argumen sistematis untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan publik. Weimer dan Vining (1998) menekankan bahwa produk dari analisis kebijakan adalah nasihat atau rekomendasi yang membantu pembuat kebijakan memecahkan masalah publik dengan mempertimbangkan berbagai alternatif dan konsekuensinya. Pendekatan ini menekankan pentingnya komunikasi, sumber daya, disposisi aktor, dan struktur birokrasi, sesuai dengan model Edward III, agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif.

Dalam konteks Kabupaten Lahat, sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah, yaitu sebesar 54,53% pada tahun 2023 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat, 2024). Pendapatan ini memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan UMKM. Namun, data menunjukkan bahwa meskipun pendapatan per kapita meningkat menjadi Rp65,83 juta per tahun, tingkat kemiskinan tetap tinggi, menempatkan Lahat pada peringkat kedua tertinggi di Sumatera Selatan. Dengan menggunakan kerangka analisis kebijakan Edward III, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan implementasi kebijakan. Faktor komunikasi antara pemerintah dan masyarakat serta penyebaran informasi tentang program pemberdayaan

masih terbatas. Sumber daya yang tersedia belum sepenuhnya diarahkan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, sedangkan disposisi birokrat dan struktur organisasi belum optimal untuk memastikan distribusi manfaat dari sektor pertambangan dapat dirasakan merata. Oleh karena itu, meskipun sektor pertambangan mendorong pertumbuhan ekonomi, manfaatnya belum sepenuhnya terdistribusi kepada masyarakat, menunjukkan perlunya perbaikan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan publik di Kabupaten Lahat.

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia dan menempati peringkat keempat secara nasional. Luas area tambang batu bara di provinsi ini mencapai sekitar 31.454 hektare, dengan tingkat produksi mencapai 20 juta ton per tahun. Salah satu wilayah utama penghasil batu bara di Sumatera Selatan adalah Kabupaten Lahat, yang memiliki cadangan sumber daya melimpah dan aktivitas pertambangan yang cukup intensif yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah (Sulistiana, 2025). Berikut disajikan analisis tren kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Lahat.

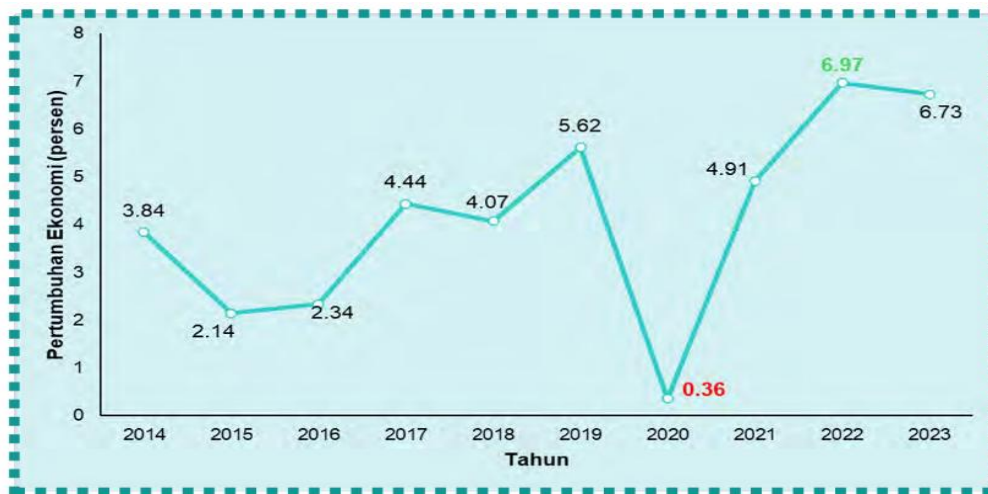
Tabel 1. Kontribusi lima sektor utama terhadap PDRB Kabupaten Lahat tahun 2022-2023

Sektor	2022 (%)	2023 (%)
Pertambangan dan Penggalian	54,90	54,53
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,37	13,41
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,55	9,80
Konstruksi	6,26	6,25
Industri Pengolahan	3,90	3,90

Sumber : (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat, 2024)

Berdasarkan Tabel 1, sektor pertambangan dan penggalian memiliki kontribusi yang sangat dominan terhadap struktur perekonomian Kabupaten Lahat, yaitu sebesar 54,90% pada tahun 2022 dan 54,53% pada tahun 2023. Dominasi ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah masih sangat bergantung pada sektor ekstraktif dibandingkan dengan sektor produktif lainnya seperti pertanian, perdagangan, konstruksi, dan industri pengolahan yang memiliki kontribusi relatif lebih kecil. Kondisi ini memiliki implikasi kebijakan yang penting, yaitu perlunya pengelolaan sektor pertambangan secara lebih strategis agar manfaat ekonominya dapat didistribusikan secara lebih merata kepada masyarakat.

Dalam praktiknya, tingginya kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB tidak selalu sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan penyerapan tenaga kerja lokal, distribusi pendapatan yang tidak merata, serta kelemahan dalam tata kelola pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari sektor pertambangan. Selain itu, kurang optimalnya integrasi kebijakan antara sektor pertambangan dengan pengembangan sektor ekonomi lainnya juga berpotensi menimbulkan ketergantungan ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih terintegrasi melalui optimalisasi dana bagi hasil, penguatan program pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan sektor ekonomi alternatif agar kontribusi sektor pertambangan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga mampu menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.



Gambar 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lahat Tahun 2014-2023
(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat 2024)

Angka ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Lahat kembali tumbuh stabil setelah sempat terdampak pandemi Covid-19 pada tahun-tahun sebelumnya dan kesejahteraan masyarakat naik seiring dengan meningkatnya aktivitas dan nilai tambah dari sektor pertambangan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat, 2024).

Tabel 2. Kontribusi sektor pertambangan mineral dan Batubara terhadap pendapatan daerah Kabupaten Lahat Tahun 2021-2023

Tahun	Penerimaan pertambangan (Rp miliar)	Total pendapatan daerah (Rp miliar)	Kontribusi (%)	Kriteria
2021	313,15	2.198,23	14,25	Kurang
2022	470,71	2.380,58	19,77	Kurang
2023	1.090,17	2.986,52	36,49	Cukup baik

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2021-2023

Kontribusi pertambangan mineral dan Batubara terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Lahat menunjukkan tren peningkatan selama periode 2021-2023 (Pemerintah Kabupaten Lahat, 2023). Pada tahun 2021, kontribusi pertambangan mineral dan Batubara terhadap pendapatan daerah sebesar 14,25%, yang menurut kriteria kontribusi termasuk dalam kategori “kurang”, artinya sektor pertambangan mineral dan Batubara kurang memberikan peran terhadap peningkatan pendapatan daerah masih didominasi oleh sektor yang lain. Pada tahun 2022, kontribusi pertambangan mineral dan Batubara meningkat menjadi 19,77%, yang masuk dalam kategori “kurang” meski mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya tetapi masih menunjukkan bahwa peranan sektor pertambangan, khususnya mineral dan Batubara belum mendominasi pendapatan daerah. Kemudian, pada tahun 2023 kontribusi pertambangan mineral dan Batubara melonjak menjadi 36,49%, yang termasuk dalam kategori “cukup baik” menandakan bahwa sektor pertambangan mineral dan Batubara mengalami kenaikan signifikan dan cukup berkontribusi terhadap pendapatan daerah Kabupaten Lahat.

Berdasarkan data BPS dan CaLK yang menunjukkan bahwa pada tahun 2023 pendapatan Kabupaten Lahat mengalami peningkatan 36,49% dengan kontribusi terbesar dari sektor pertambangan mineral dan Batubara (Badan Pusat Statistik Lahat, 2024). Namun, data Badan Statistik Indonesia (BPS) menunjukkan ketidakseimbangan antara

pendapatan daerah dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lahat. Hal ini terlihat pada Tabel 3, bahwa Kabupaten Lahat menduduki peringkat kedua sebagai penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 3. Presentasi Penduduk Miskin di Sumatera Selatan Tahun 2023-2024

No	Wilayah	Presentase	
		2023	2024
1	Musi Rawas Utara	18,26 %	17,38 %
2	Lahat	15,00 %	14,14 %
3	Musi Rawas	14,13 %	13,44 %

Sumber : sumsel.bps.go.id

Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Lahat tahun 2023 mencapai 15,00% dan tahun 2024 mencapai 14,14 %, hanya berada di bawah Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 18,26 % tahun 2023 dan 17,38 % tahun 2024 (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024). Meskipun Kabupaten Lahat bukan menduduki posisi teratas, namun dengan jumlah pendapatan daerah dan sumber daya alam yang melimpah belum mampu berimplikasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Fenomena ini sejalan dengan konsep *resource curse* yaitu kondisi ketika daerah yang kaya sumber daya alam justru mengalami ketimpangan pembangunan sosial ekonomi akibat ketergantungan berlebihan pada sektor ekstraktif. Ketergantungan terhadap sektor pertambangan yang bersifat padat modal dan minim penyerapan tenaga kerja menyebabkan distribusi manfaat ekonomi tidak merata. Dalam perspektif analisis kebijakan publik, kondisi ini menunjukkan adanya persoalan pada tahap formulasi dan implementasi kebijakan, terutama dalam desain kebijakan redistribusi dan perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak. Jika mengacu pada model implementasi kebijakan George C. Edward III, efektivitas kebijakan sangat ditentukan oleh komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Apabila kebijakan pertambangan lebih berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah tanpa mekanisme distribusi yang jelas, maka tujuan kesejahteraan sosial sulit tercapai.

Di Kabupaten Lahat, garis kemiskinan (GK) tahun 2023 tercatat sebesar Rp547.203 per bulan, lebih tinggi dibandingkan GK Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp520.754 per bulan (Badan Pusat Statistik Lahat, 2023). Data ini menunjukkan bahwa standar kebutuhan minimum masyarakat Lahat relatif lebih besar dibandingkan rata-rata provinsi. Secara kebijakan, kondisi ini mengindikasikan belum optimalnya kebijakan pengelolaan pendapatan daerah dalam merespons kenaikan biaya hidup dan perubahan struktur ekonomi lokal. Pergeseran dari sektor pertanian ke sektor pertambangan menyebabkan hilangnya lahan produktif dan sumber penghidupan masyarakat, tanpa diimbangi program transisi ekonomi yang memadai seperti pelatihan kerja, diversifikasi usaha, atau penguatan UMKM. Konversi lahan pertanian menjadi kawasan tambang juga berdampak pada degradasi lingkungan, hilangnya kawasan hutan, serta berkurangnya daerah resapan air. Dampak ekologis tersebut meningkatkan risiko bencana dan menurunkan kualitas kesehatan masyarakat akibat polusi udara dan pencemaran air. Dalam perspektif *good governance* sebagaimana dipromosikan oleh World Bank, tata kelola pertambangan seharusnya menjamin prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan lingkungan. Namun, apabila pengawasan lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan tidak dijalankan secara konsisten, maka biaya sosial dan ekologis akan lebih besar dibandingkan manfaat ekonominya.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Hermawan, H. R (2014) yang menunjukkan bahwa daerah dengan ketergantungan tinggi pada sektor pertambangan mengalami ketimpangan distribusi ekonomi dan peningkatan garis kemiskinan, tetapi berbeda dengan penelitian Wahyu Nugroho (2017) yang menemukan bahwa intervensi program pemberdayaan UMKM dan pelatihan kerja di daerah tambang dapat menurunkan kemiskinan secara signifikan, menunjukkan pentingnya kebijakan redistribusi dan program transisi ekonomi yang efektif.

Meskipun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lahat tahun 2023 mencapai 6,73% yang sebagian besar didorong oleh sektor pertambangan (12,44%) dan penyediaan akomodasi serta makanan minum (12,38%) pertumbuhan tersebut belum secara signifikan menurunkan tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Dalam kerangka analisis kebijakan publik, kondisi ini menegaskan pentingnya kebijakan redistribusi yang lebih berpihak kepada masyarakat terdampak tambang, seperti penguatan program pemberdayaan ekonomi lokal, optimalisasi dana bagi hasil untuk sektor pendidikan dan kesehatan, serta pengawasan ketat terhadap implementasi CSR. Tanpa intervensi kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan, tingginya pendapatan daerah dari sektor pertambangan tidak secara otomatis berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa meskipun pendapatan daerah Kabupaten Lahat mengalami peningkatan yang cukup besar berkat kontribusi sektor pertambangan, angka kemiskinan masih tergolong tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan daerah belum sepenuhnya berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu melihat bagaimana arah dan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, serta sektor mana yang menjadi fokus utama penggunaan anggaran, sehingga dapat diketahui sejauh mana hasil dari sektor pertambangan benar-benar dialokasikan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Penentuan target dan sasaran pembangunan Kabupaten Lahat tahun 2023 didasarkan pada capaian pembangunan sebelumnya serta disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Lahat Tahun 2019-2023. Tahun 2023 menjadi tahun pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat akibat dampak pandemi COVID-19, dengan tema: "Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Mandiri dan Berkelanjutan Didukung Kualitas serta Produktivitas SDM yang Berdaya Saing, Inovatif dan Berakhlak, serta Optimalisasi Pemantapan Infrastruktur Daerah." Tema ini menggambarkan upaya Pemerintah Kabupaten Lahat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi, SDM, dan pemerataan pembangunan daerah, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Optimalisasi pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan.
2. Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur dan konektivitas daerah.
3. Penguatan sumber daya manusia yang berdaya saing, kreatif, inovatif, serta penguasaan IPTEK.
4. Penguatan ekonomi kreatif, produktif, dan mandiri serta pemanfaatan sumber daya alam ramah lingkungan yang berkelanjutan.
5. Memperkokoh kerukunan beragama dan stabilitas keamanan.

Dari lima program prioritas yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Lahat memfokuskan arah kebijakan pembangunan pada berbagai sektor yang dianggap strategis bagi kemajuan daerah (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2023). Namun, jika ditinjau dari struktur alokasi belanja, terlihat bahwa Sebagian besar anggaran masih terserap pada dua pos besar, yaitu belanja rutin pemerintahan dan reformasi birokrasi serta pembangunan infrastruktur fisik. Kedua sektor ini memang penting untuk menjaga keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan memperkuat fondasi pembangunan daerah, tetapi keduanya memiliki dampak yang tidak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pertama, belanja rutin pemerintahan dan reformasi birokrasi merupakan komponen anggaran yang secara struktural menyerap porsi cukup besar dalam APBD. Belanja ini meliputi pembayaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN), belanja barang dan jasa untuk operasional kantor, pemeliharaan aset daerah, perjalanan dinas, serta program reformasi birokrasi seperti digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas aparatur, dan penguatan sistem pengawasan internal. Secara normatif, belanja ini memang penting untuk menjaga stabilitas administrasi pemerintahan dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan. Reformasi birokrasi juga bertujuan menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, secara ekonomi, belanja rutin cenderung bersifat *internal circulation of funds*, yakni dana berputar di lingkungan birokrasi dan aparatur. Dampak penggandanya (*multiplier effect*) terhadap masyarakat miskin relatif kecil karena pengeluaran tersebut tidak secara langsung meningkatkan produktivitas atau pendapatan rumah tangga miskin. Kenaikan gaji ASN misalnya, lebih banyak meningkatkan konsumsi kelompok berpendapatan tetap, bukan kelompok miskin ekstrem. Dengan demikian, meskipun penting untuk menjaga fungsi negara, belanja ini belum tentu efektif sebagai instrumen utama pengentasan kemiskinan.

Kedua, pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, irigasi, perumahan, dan fasilitas publik lainnya memang memiliki dampak ekonomi makro yang signifikan. Infrastruktur yang memadai dapat memperlancar mobilitas orang dan barang, menurunkan biaya logistik, memperluas akses pasar, serta menarik investasi baru. Dalam konteks wilayah seperti Kabupaten Lahat yang memiliki potensi pertambangan, infrastruktur juga mendukung distribusi hasil tambang dan aktivitas ekonomi regional. Akan tetapi, manfaat pembangunan infrastruktur sering kali bersifat tidak langsung (*indirect impact*). Jika tidak disertai strategi pemberdayaan ekonomi lokal, maka masyarakat sekitar terutama kelompok miskin tidak otomatis memperoleh peningkatan pendapatan. Dalam banyak kasus, proyek infrastruktur lebih banyak melibatkan kontraktor besar dari luar daerah, tenaga kerja terampil dari luar, serta rantai pasok yang tidak sepenuhnya melibatkan pelaku usaha lokal. Akibatnya, nilai tambah ekonomi tidak sepenuhnya tinggal di wilayah tersebut, khususnya di kawasan pertambangan yang justru menjadi sumber utama pendapatan daerah.

Kondisi inilah yang memunculkan fenomena paradoks sumber daya (*resource paradox*) di Kabupaten Lahat. Meskipun sektor pertambangan mineral dan batubara memberikan kontribusi dominan terhadap PDRB dan pendapatan daerah, angka kemiskinan masih relatif tinggi. Secara teoretis, situasi ini sejalan dengan konsep “kutukan sumber daya” (*resource curse*), di mana daerah kaya sumber daya alam tidak selalu mampu mengonversi kekayaan tersebut menjadi kesejahteraan masyarakat secara merata. Dalam konteks ini, struktur belanja daerah yang lebih dominan pada belanja rutin dan proyek fisik skala besar menyebabkan distribusi manfaat ekonomi menjadi tidak inklusif.

Manfaat ekonomi sektor tambang cenderung terkonsentrasi pada pelaku usaha besar, kontraktor proyek, serta lingkaran birokrasi pemerintahan. Sementara itu, masyarakat miskin terutama di pedesaan dan wilayah sekitar tambang masih menghadapi keterbatasan akses modal, keterampilan, pasar, dan teknologi. Tanpa intervensi yang menyentuh langsung ekonomi rumah tangga, pertumbuhan ekonomi makro tidak otomatis menurunkan kemiskinan. Padahal, strategi pengentasan kemiskinan yang efektif memerlukan pendekatan berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program seperti pengembangan UMKM dan industri kreatif lokal, pelatihan kewirausahaan, bantuan pembiayaan mikro, penguatan koperasi desa, peningkatan kapasitas petani melalui irigasi produktif dan akses pasar, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan keluarga. Pendekatan ini juga selaras dengan prioritas keempat RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2023 yang menekankan penguatan ekonomi kerakyatan dan penurunan kemiskinan.

Dengan demikian, jika kebijakan fiskal daerah lebih diarahkan pada belanja yang bersifat pro-poor dan pro-job, maka pendapatan besar dari sektor pertambangan dapat dikonversi menjadi penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas masyarakat lokal, dan penurunan angka kemiskinan secara berkelanjutan. Reorientasi anggaran menuju program pemberdayaan akan memperkuat keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga kekayaan sumber daya alam benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang inklusif, bukan sekadar meningkatkan angka statistik pertumbuhan ekonomi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sektor pertambangan mineral dan batu bara memiliki kontribusi dominan terhadap struktur perekonomian di Kabupaten Lahat. Kontribusi terhadap PDRB mencapai 54,53 persen, dengan peningkatan pendapatan daerah dari 14,25 persen pada tahun 2021 menjadi 36,49 persen pada tahun 2023. Dalam perspektif analisis kebijakan publik, capaian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sektor pertambangan cukup efektif dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah (output kebijakan). Namun, keberhasilan pada level output belum sepenuhnya menghasilkan outcome berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tingginya tingkat kemiskinan yang masih mencapai 14,14 persen pada tahun 2024 kedua tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan mengindikasikan adanya kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh belum optimalnya komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya pendukung pemberdayaan masyarakat, lemahnya koordinasi antarorganisasi, serta orientasi birokrasi yang masih berfokus pada peningkatan pendapatan, bukan distribusi kesejahteraan. Selain itu, dalam kerangka *good governance* sebagaimana dikemukakan oleh World Bank, pengelolaan pendapatan sektor pertambangan seharusnya memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan keadilan sosial. Fakta bahwa pertumbuhan ekonomi belum berdampak signifikan pada penurunan kemiskinan menunjukkan bahwa kebijakan redistribusi dan afirmasi ekonomi lokal belum berjalan optimal.

Untuk mengoptimalkan kontribusi sektor pertambangan terhadap pembangunan daerah, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan manfaat bagi masyarakat.

Pendapatan yang dihasilkan dari sektor pertambangan, seperti dana bagi hasil dan penerimaan daerah lainnya, perlu dimanfaatkan secara strategis untuk mendukung pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar. Selain itu, pemerintah daerah perlu mendorong pengembangan UMKM lokal, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta diversifikasi ekonomi guna mengurangi ketergantungan yang berlebihan pada sektor pertambangan. Dengan demikian, kontribusi sektor pertambangan tidak hanya berperan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

BIOGRAFI PENULIS

Zetia Wijayanti, S.I.P., M.A.P. adalah seorang dosen di Universitas Sriwijaya, yang mengkhususkan diri dalam tridharma perguruan tinggi. Dia memegang gelar sarjana di Administrasi Negara dari Universitas Sriwijaya dan gelar Magister dari Universitas Diponegoro. Saat ini, dia adalah seorang pengajar aktif di Universitas Sriwijaya dengan fokus pada Kebijakan Publik.

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=6_UBUxQAAAAI

Email: zetiawijayanti@fisip.unsri.ac.id

Pandu Pamungkas, S.A.N., M.Si. adalah seorang dosen di Universitas Sriwijaya, yang mengkhususkan diri dalam tridharma perguruan tinggi. Dia memegang gelar sarjana di Administrasi Negara dari Universitas Lampung dan gelar Magister dari Universitas Lampung. Saat ini, dia adalah seorang pengajar aktif di Universitas Sriwijaya dengan fokus pada Pelayanan Publik.

Google Scholar: <https://scholar.google.com/citations?user=4bmNv20AAAAI>

Email: pandupamungkas@fisip.unsri.ac.id

Maelani merupakan mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Saat ini penulis sedang dalam tahap penyusunan skripsi.

Email: maelani_world@gmail.com

Anisa Bella merupakan mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Saat ini penulis sedang dalam tahap penyusunan skripsi.

Email: bellanisa21@gmail.com

Angel Lauren merupakan mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Saat ini penulis sedang dalam tahap penyusunan skripsi.

Email: angel_laurens@gmail.com

Dewi Eliza merupakan mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Saat ini penulis sedang dalam tahap penyusunan skripsi.

Email: elizadewi33@gmail.com

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lahat. (2023). *Rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Lahat (RKPD)*. Pemerintah Kabupaten Lahat.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024). *Persentase penduduk miskin (P0) menurut kabupaten/kota—tabel statistik*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjIxIzI=/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat. (2024). *Statistik daerah Kabupaten Lahat 2024*. <https://lahatkab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/145913e793abb768444d6267/statistik-daerah-kabupaten-lahat-2024.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat. (2023). *Profil kemiskinan Kabupaten Lahat tahun 2023*. <https://lahatkab.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/15/735/profil-kemiskinan--kabupaten-lahat--tahun-2023.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat. (2024). *Produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Lahat*. <https://lahatkab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/02/28/814/laju-pertumbuhan-ekonomi-kabupaten-lahat-tahun-2023-tumbuh-6-73-persen.html>
- Cudai, A., & Guntur, N. M. (n.d.). *Analisis kebijakan publik*.
- Dewa, M. J., Sinapoy, M. S., Haris, O. K., Tatawu, G., Sensus, L., & Arifin. (2023). Kebijakan hukum pengelolaan pertambangan berbasis kesejahteraan masyarakat. *Halu Oleo Legal Research*, 5(1), 157–170.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Garcia, A. R., Filipe, S. B., Fernandes, C., Estevão, C., & Ramos, G. (2023). *Lahat membangun 2023*. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lahat.
- Hermawan, H. R., & Sugema, I. (2014). Pengaruh sektor pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Repository Institut Pertanian Bogor.
- Indonesia, Republik. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Ranto, I. D. M., Jaka Ferdian, & Komang. (2023). Dampak sosioekonomi masyarakat lokal terhadap pertambangan timah dan potensi pendapatan daerah sektor sumber daya alam di Kabupaten Belitang Timur. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 5(1), 76–90.

- Ridwan, M., Ulum, B., Muhammad, F., Indragiri, I., & Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, U. (n.d.). Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah. <http://journal.fdi.or.id/index.php/jmas/article/view/356>
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah*.
- Siska. (2013). Dampak industri batubara terhadap sosial ekonomi masyarakat di sekitar Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara. *eJournal Administrasi Negara*, 1(2), 473–493.
- Sulistiana, E. (2025). Bukan cuma Kalimantan! Ini 5 daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia, Sumsel di posisi berapa? *Palembang Ekspres*. <https://palpres.bacakoran.co/read/45141/bukan-cuma-kalimantan-ini-5-daerah-penghasil-batu-bara-terbesar-di-indonesia-sumsel-di-posisi-berapa/30>
- Wahyu Nugroho, A., & Yassir, I. (2017). Kebijakan penilaian keberhasilan reklamasi lahan pasca-tambang batubara di Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 14(2), 121–136. <https://doi.org/10.20886/jakk.2017.14.2.121-136>
- Wahyudin, U. (2020). Analisis dampak keberadaan perusahaan tambang. *Vol. 1*(1).
- Zaini, A. (2018). Pengaruh kekayaan sumber daya alam batubara terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Borneo Administrator*, 13(2), 111–130.
- Zaki. (2024). Produksi batubara tembus 44 juta MT. *Lahat Pos*. <https://lahatpos.bacakoran.co/read/1763/produksi-batubara-tembus-44-juta-mt>